

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek One Health pada tanggal 16 April 2024 – 18 Mei 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di Apotek One Health telah meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di komunitas yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, pemusnahan dan pelayanan swamedikasi serta pelayanan resep.
2. Kegiatan PKPA di Apotek One Health memberikan pengalaman bagi calon apoteker untuk dapat mengetahui strategi dalam pengembangan suatu apotek.
3. Kegiatan PKPA di Apotek One Health telah memberikan tempat bagi calon apoteker untuk dapat mengembangkan diri dengan didasari nilai keutamaan yaitu PEKA (Peduli, Komit dan Antusias) dan dapat membantu calon apoteker untuk bisa meningkatkan keterampilan dan *soft skill*.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan PKPA di Apotek One Health yaitu sebagai berikut:

1. Calon Apoteker perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian dan melatih kemampuan berkomunikasi sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan benar, jelas dan mudah dipahami.
2. Calon Apoteker harus mempelajari, memahami dan selalu *update* mengenai peraturan yang tercantum pada Undang-undang kefarmasian yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor FY.01.01/1/785/2021 Tahun 2021 tentang Implementasi Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Jakarta: Direktur Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia.
- Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor FY.07.03/E.IV/781/2023 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Republik Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^a . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.001/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Standar Praktik Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^b . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.002/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^c . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.004/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia. 82
- Ikatan Apoteker Indonesia^d . Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Komite Farmasi Nasional dan Konsil Tenaga Kesehatan. Surat Edaran Nomor KT.05.02/1/9754/2021 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker Elektronik (ESTRA). Jakarta:
- Komite Farmasi Nasional dan Konsil Tenaga Kesehatan. 84 Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . 2021, Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia